

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Rumah Tangga Di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Karakteristik Masalah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari masih terlihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah desa, sehingga masyarakat menjadi kesulitan dalam membuang dan mengelola sampah rumah tangga. Selain itu, keterlibatan Pemerintah Desa dalam upaya pengelolaan sampah juga terbilang minim, yang menyebabkan kurang optimalnya penanganan persoalan ini di tingkat desa. Kemudian upaya solutif desa masih belum diberikan oleh pemerintah desa kebonsari karena selama ini pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kebonsari dilakukan secara mandiri atau perseorangan. Kemudian dampak kebijakan dari pengelolaan sampah rumah tangga bagi Desa Kebonsari adalah berkurangnya timbunan sampah rumah tangga, dan bertambahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Karakteristik Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari menunjukkan adanya pemahaman yang cukup baik dari masyarakat terhadap isi kebijakan. Hal ini tercermin dari partisipasi warga dalam kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) melalui bank sampah yang ada di desa. Meskipun demikian, hingga saat ini Desa

Kebonsari belum memiliki regulasi khusus di tingkat desa yang mengatur secara formal pengelolaan sampah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah. Selain itu, tujuan dan manfaat dari kebijakan pengelolaan sampah juga telah dipahami dengan cukup baik, baik oleh masyarakat maupun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Pemahaman ini tercermin melalui implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan peran masing-masing, serta adanya penurunan volume sampah rumah tangga di desa. Namun, dari segi sumber daya, Desa Kebonsari masih menghadapi keterbatasan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Minimnya dukungan dari Pemerintah Desa, baik dari segi fasilitas maupun pembiayaan, menjadi salah satu kendala utama dalam penguatan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

3. Karakteristik Lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari menunjukkan adanya tantangan dan potensi sekaligus. Dari sisi dukungan politik, hingga saat ini Desa Kebonsari masih belum memperoleh perhatian atau komitmen politik yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran program yang seharusnya dapat didorong melalui kebijakan dan dukungan formal dari pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup terlihat aktif. Hal ini tercermin dari partisipasi warga dalam kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) melalui bank sampah yang ada di desa. Tetapi masih ada masyarakat yang menolak adanya pembangunan TPST di Desa Kebonsari

4. Dengan demikian, pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan sabatier dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian "Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" sudah terimplementasi dengan cukup baik. Dari ketiga fokus penelitian tersebut, indikator yang paling mendukung untuk pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 di Desa Kebonsari adalah indikator lingkungan karena partisipasi masyarakat sudah baik sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari dapat berjalan sesuai amanat Peraturan Bupati, sedangkan indikator yang kurang mendukung dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan adalah indikator karakteristik masalah karena Desa kebonsari membutuhkan Sumber Daya lebih baik dan dukungan lebih lanjut dari Pemerintah Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Pemerintah Desa Kebonsari dan Dukungan Politik

Anggaran, fasilitas, dan alat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah atau kegiatan sosialisasi Desa Kebonsari harus ditenahi. Perancangan anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana-prasarana harus dilakukan pemerintah desa kebonsari agar pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dapat berjalan optimal.

2. Upaya Solutif Desa

Desa seharusnya memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga untuk lingkup desa, sehingga dapat menyesuaikan bagaimana keadaan sampah di desa.

3. Melakukan monitoring

Agar kebijakan dapat berjalan dengan konsisten dan mempermudah mencapai tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Desa harus melakukan monitoring secara rutin untuk mengetahui perkembangan pengelolaan sampah.

4. Pembangunan TPS

Pembangunan TPS di Desa Kebonsari harus segera dilakukan agar sampah rumah tangga dapat dikelola oleh Desa Kebonsari, bukan melalui perorangan.